

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam kajian pustaka ini bertujuan sebagai referensi kajian penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian terdahulu pun dapat berfungsi sebagai pembanding sehingga meskipun memiliki tema yang sama akan tetapi dikaji dalam sudut pandang yang berbeda. Penelitian terdahulu ini terdiri dari artikel maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian penelitian yang saat ini dilakukan, baik dalam ruang lingkup tema maupun metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan kajian penelitian.

Pertama, Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017 dengan judul Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Metode Patanjala, menjelaskan bagaimana cara atau upaya untuk meningkatkan partisipasi atau keberdayaan dalam pembangunan lingkungan hidup, mengingat kondisi lingkungan yang semakin parah. Dengan menggunakan metode patanjala, yaitu sebuah metode dalam melakukan pelestarian dari segi lingkungan hidup, maka kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah. Konsep patanjala yang dilakukan juga didukung dengan adanya gerakan sosial lingkungan dan pemberdayaan hukum, sehingga pembangunan lingkungan menjadi lebih optimal (Rahayu, Susanto, & Muliya, 2017).

Kedua, Muhammad Akhir dan Syaribulan K dalam Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiolog Volume III No. 2 November 2016 yang berjudul Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan, menemukan fakta bahwa gerakan sosial peduli lingkungan adalah salah satu cara masyarakat untuk menjaga kelestarian alam serta menyelamatkan ekosistem alam. Di samping

itu, dengan terjaganya lingkungan masyarakat, maka secara otomatis memengaruhi kesehatan masyarakat untuk hidup sehat di Kecamatan Awangpone (Rahman, Akhir, & Syaribulan, 2016).

Ketiga, Dimpos Manalu dalam Jurnal Populasi, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2007 yang berjudul Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik (kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara), terdapat fakta bahwasanya gerakan masyarakat yang merupakan gerakan perlawanan masyarakat di Porsea (Toba Samosir) dan sekitarnya merupakan salah satu dari berbagai kasus yang memperlihatkan peran sebuah gerakan sosial dalam hal mengubah keputusan atau kebijakan pemerintah, yang sekaligus dapat mendorong perubahan karakter manajemen atau operasi dalam perusahaan PT. Inti Indorayon Utama. Gerakan sosial bisa menjadi sebuah alternatif yang sangat efektif untuk mendesak akibat suatu perubahan kebijakan publik yang diakibatkan karena banyak mekanisme atau jalur formal yang minim bahkan tertutup (Manulu, 2017).

Keempat, Abdi Rahmat dalam Jurnal Sosiologi Volume 19, Nomor 1, Januari 2014 dengan judul Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin, mengatakan bahwa civil society memiliki arti penting dapat dilihat dari penyelenggaraan sekolah yang dibuat untuk anak miskin yang dapat dilihat dari konteks struktur sosial dalam masyarakat ataupun kebijakan negara.

Pada penelitian ini, peneliti sama-sama menggunakan kerangka ataupun konsep gerakan sosial yang mana berfokus pada keadaan dinamika aktor civil society organisation (CSO) , terdapat pula penyelenggaraan pendidikan untuk mengatasi sebuah persoalan yakni kemiskinan struktural yang terjadi. Pada awal penulisan ini terdapat uraian tentang beberapa dimensi gerakan sosial yang dalam penyelenggaraan sekolah yang dikhususkan untuk anak miskin yang

menjadi sebuah karakteristik SO tersebut. Serta dapat menguraikan tentang peluang untuk pengembangan dan keberlanjutan gerakan CSO tersebut (Rahmat, 2014).

Kelima, Dara Fatia dan Yogi Suprayogi Sugandi dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No.2, Juni 2019 dengan judul Gerakan Tanpa Sedotan: Hindari Kerusakan Lingkungan dalam SOSIOGLOBAL, menemukan fakta bahwa gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peneliti dalam tulisannya membahas tentang isu gerakan sosial baru yaitu #NoStrawMovement. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan ajakan masyarakat untuk berpartisipasi untuk memelihara, menjaga, dan merawat lingkungan mereka sendiri dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik. Keberhasilan gerakan ini dengan di tunjukan berkurangnya penggunaan sedotan plastik secara signifikan dikalangan masyarakat. Juga dipengaruhi oleh beberapa restaurant yang tidak lagi menyediakan sedotan plastik bagi masyarakat. Gerakan anti sedotan ini terus meluas dan membuat kesadaran bagi hampir setiap kalangan masyarakat (Fatia & Suprayogi, 2019).

Keenam, Rizky Agus Harnanto, dkk dalam Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW) Volume 2, Nomor 1, Tahun 2018, dengan judul Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia, menunjukkan fakta bahwa gerakan sosial muncul karena adanya kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Kendeng, Kabupaten Rembang untuk membela hak-hak rakyat. Bentuk pelanggaran HAM tersebut dapat dibuktikan dari berbagai rentetan kasus dialami oleh warga, sehingga mereka membentuk gerakan sosial dalam rangka menolak pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan kendeng (Harnanto, Ummah, Rekavianti, & Ratnasar, 2018).

Ketujuh, Annisa Innal Fitri Idil Akba dalam CosmoGov , Vol. 3 No.1, April 2017 dengan judul Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen, mengatakan bahwa sebuah gerakan sosial perempuan dapat berperan strategis dalam menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, serta berperan sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat (petani dan buruh tani).

Gerakan perempuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlawanan srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, yang setiap harinya melakukan interaksi dengan alam. Para remaja perempuan dan ibu di sana untuk menolak melalui langkah apapun mengenai pendirian sebuah pabrik semen karena masyarakat yakin pembangunan tersebut dapat merusak sumberdaya air dan dapat mematikan sektor pertanian (Akba, 2017).

Kedelapan, oleh Yongky Gigih Prasisko dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 3, Nomor 2, Agustus 2016. Dengan judul Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia, dalam penjelasannya merupakan penggambaran mengenai perkembangan masyarakat kontemporer di Indonesia yang dapat dikatakan sejalan dengan apa yang disebut perkembangan teknologi global, yang dalam kenyataannya juga berdampak terhadap munculnya konflik sosial khusus. Konflik seperti demikian akan melibatkan kelompok dari kelas menengah yang mempunyai nilai-nilai demokrasi. Pada sisi lain, konflik tersebut akan juga ikut membentuk dinamika dalam pergerakan sosial baru. (Prasisko, 2016).

Kesembilan, Idil Akbar dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 107 – 115 dengan judul Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial), menemukan realitas bagaimana demokrasi dapat menjadi faktor penting bagi gerakan sosial, khususnya terkait dengan gerakan mahasiswa terhadap dinamika

perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, idealisme mahasiswa menjadi nilai sejauh mana perubahan sosial tersebut berjalan dengan semestinya atau penuh dengan kepentingan. Gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial merupakan faktor paling penting dalam mewujudkan gerakan sosial (Akbar, 2016).

Kesepuluh, Wahyudi dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12 Nomor 1 Januari - Juni 2009 dengan judul Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibar Malang Selatan, menggambarkan bagaimana gerakan petani yang terjadi sejak era order baru.

Adapun gerakan sosial petani Kalibakar dalam studi ini merupakan gerakan yang diikuti atau dilakukan oleh petani yang terdiri dari enam desa (Simojayan, Tirtoyudo, Tlogosari, Baturetan, Kepatihan, dan Bumirejo) yang terdapat tujuan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan status tanah esk HGU Perkebunan Belanda melalui program land reform (Wahyudi, 2009)

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu dan Relevansi

No.	Judul & Penulis	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk. <i>“Gerakan Sosial Pemberdayaan Hukum Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala”</i> . Jurnal Bina Hukum	Dalam penelitian ini, gerakan sosial yang dilakukan oleh KPLH Belantara bertujuan untuk mengembalikan kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan terciptanya pemberdayaan hukum. Kehadiran gerakan sosial yang mengusung kearifan	<b>Persamaan:</b> Keuda penelitian ini sama - sama berfokus pada gerakan sosial serta memiliki kesamaan tujuan yaitu sebagai upaya dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Dalam konteks

	Lingkungan Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017	budaya lokal Sunda dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup juga merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup.	metode penelitian, kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif .  <b>Perbedaan :</b> Penelitian sebelumnya fokus pada gerakan sosial dari segi pemberdayaan hukum dengan metoden tersendiri. Sedangkan penelitian yang sata ini dilakukan berfokus pada upaya untuk menganalisis bagaimana Gerakan Pendowo Bangkit dan Gerakan <i>Green Woman</i> dalam menolak penimbunan limbah PT Putra Restu Ibu Abadi.
2.	Muhammad Akhir dan Syaribulan K. " <i>Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan</i> ". Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiolog Volume III No. 2 November 2016.	Dalam penelitian ini Gerakan Sosial peduli lingkungan masyarakat Awangpone yang dimulai pada tahun 2011 tidak terstruktur dan bersifat spontan, tetapi berubah lebih ke arah maju dengan cara membuka jalur hukum dan membentuk sebuah organisasi.	<b>Persamaan :</b> Kedua penelitian ini sama-sama fokus pada munculnya gerakan sosial khususnya gerakan sosial lingkungan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan . Jenis penelitian yang digunakan kedua penelitian ini pun yaitu deskriptif kualitatif.  <b>Perbedaan :</b> Perbedaan dalam kedua penelitian yaitu terletak

			<p>pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Awangpon Kabupaten Bone sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan berlokasi di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Selain itu, juga terdapat perbedaan dari segi teori yang digunakan, jika penelitian terdahulu berlandaskan pada teori motivasi Maslow, maka penelitian yang saat ini dilakukan menggunakan teori Gerakan Sosial Identitas Kolektif oleh Alberto Melucci.</p>
3.	<p>Dimpos Manalu. <i>“Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik (kasus Perlawanan Masyarakat Batak vc PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea , Sumatera Utara)”</i>. Jurnal Populasi, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2007</p>	<p>Pada kasus perlawanan antara masyarakat Batak melawan PT Indorayon, yang terjadi di Porsea, Sumatera Utara, terdapat berbagai keputusan atau kebijakan publik yang berkaitan dengan keberadaan pabrik tersebut yang mana berfokus pada pengelolaan bubur kayu dan kertas yang terjadi secara reaktif dan prosedural non formal sebagai bagian dari respon atas desakan</p>	<p><b>Persamaan :</b> Kedua penelitian ini sama–sama berfokus pada gerakan sosial sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan dalam kedua penelitian ini bukan hanya terdapat pada lokasi penelitian ataupun objek penelitian (PT. Inti Indorayon Utama dan PT. Putra Restu Ibu</p>



		<p>perlawanan masyarakat Porsea dan Toba Smosir dan sekitarnya melawan Indorayon menjadi kasus yang sangat menarik mengenai hak masyarakat sipil yang dalam hal ini bisa dicapai serta perubahan keputusan atau kebijakan publik bisa terjadi dikarenakan desakan sebuah gerakan sosial tanpa menunggu inisiatif aktor negara seperti birokrasi dan parlemen dengan kecenderungan distortif dan rumit.</p>	<p>Abadi), tetapi juga terletak pada perbedaan tujuan penelitian. Jika penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk merubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka penelitian yang saat ini dilakukan berfokus pada kegiatan menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan sosial di Desa Lakardowo dalam menolak terjadinya penimbunan limbah di desa mereka.</p>
4.	<p>Abdi Rahmat.  <i>"Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin"</i>.            Jurnal Sosiologi            Vol. 19, No. 1,            Januari 2014</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana kerangka konsep gerakan sosial yang menekankan pada dinamika aktor <i>Civil Society Organisation</i> (CSO) dan sistem penyelenggaraan pendidikan sebagai solusi menghadapi persoalan kemiskinan struktural yang terjadi.</p>	<p><b>Persamaan :</b>            Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang gerakan sosial yang muncul di kalangan masyarakat serta memiliki kesamaan pada metodologi penelitian yang dipakai yaitu kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan :</b>            Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada penggunaan jenis penelitian, yaitu studi kasus dan penelitian deskriptif. Perbedaan dalam kedua penelitian juga terletak pada fokus</p>



			gerakan sosial itu sendiri, jika penelitian terdahulu merupakan gerakan sosial pendidikan, maka kajian yang saat ini dilakukan berfokus pada gerakan sosial lingkungan.
5.	Dara Fatia dan Yogi Suprayogi Sugandi. “ <i>Gerakan Tanpa Sedotan: Hindari Kerusakan Lingkungan dalam SOSIOGLOBAL</i> ”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No.2, Juni 2019	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan, seperti halnya muncul sedotan plastik yang tidak dapat terurai dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, munculnya modernisasi juga harus diimbangi dengan upaya untuk menjaga kelestarian dan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menggaungkan gerakan tanpa sedotan plastik atau <i>#NoStrawMovement</i> sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.	<p><b>Persamaan :</b> Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dari segi metodologi penelitian yang dipakai yakni dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan keseluruhan permasalahan penelitian. Di sisi lain, fokus kajian penelitian pun berfokus pada gerakan sosial dalam rangka melestarikan lingkungan.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Jika peneliti terdahulu menggunakan Teori strukturasi oleh Anthony Giddens untuk menganalisis gerakan sosial yang terjadi, maka penelitian yang</p>

			<p>saat ini dilakukan menggunakan konsep identitas kolektif yang dikemukakan oleh Alberto Melucci. Selain itu, juga terjadi perbedaan dari segi penyebab dan dorongan munculnya gerakan sosial. Pada penelitian terdahulu, gerakan sosial muncul karena melimpahnya limbah plastik, sedangkan dalam penelitian yang saat ini dikaji oleh peneliti, gerakan sosial muncul akibat terjadinya kerusakan lingkungan karena adanya penimbunan limbah B3.</p>
6.	<p>Rizky Agus Hernanto, dkk.</p> <p><i>“Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia”</i></p> <p>Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW) Vol 2, No 1, 2018</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial muncul karena adanya kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh warga di Kendeng, Kabupaten Rembang karena menolak pembangunan semen di kawasan pengunungan kendeng. Gerakan sosial ini muncul sebagai upaya untuk membela dan mengembalikan hak-hak rakyat.</p>	<p><b>Persamaan :</b></p> <p>Kedua penelitian ini sama-sama berangkat dari munculnya gerakan sosial yang berangkat dari kasus ketidakadilan dan sebagai upaya untuk membela hak-hak rakyat yang dilanggar karena berdirinya industri yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Kedua penelitian ini juga menggunakan metodologi yang sama</p>

			<p>yakni penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian penelitian. Jika penelitian terdahulu berfokus pada gerakan untuk menolak berdirinya sebuah industri semen di Kendeng, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan berfokus pada upaya untuk menutup industri yang melakukan penimbunan limbah yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi.</p>
7.	<p>Annisa Innal Fitri Idil Akba. “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen”. Jurnal CosmoGov , Vol. 3 No.1, April 2017</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial perempuan dapat berperan secara strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, serta sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Gerakan perempuan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlawanan para srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, dalam menolak</p>	<p><b>Persamaan :</b> Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada gerakan sosial kaum perempuan yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan kelestarian lingkungan tempat tinggalnya.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian penelitian. Jika penelitian terdahulu berfokus pada gerakan untuk menolak</p>

		berdirinya pabrik semen karena diyakini dapat merusak lingkungan.	berdirinya sebuah tambang semen di Kendeng, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan berfokus pada upaya untuk menutup industri yang melakukan penimbunan limbah di Desa Lakardowo.
8.	Yongky Gigih Praisko “Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia” Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 2, Agustus 2016.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam masyarakat kontemporer kini bisa sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang memiliki dampak terhadap munculnya sebuah konflik sosial . Konflik sosial ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi terhadap nilai-nilai demokrasi, sehingga melatarbelakangi munculnya dinamika dalam sebuah pergerakan sosial baru di Indonesia.	<b>Persamaan :</b> Secara garis besar, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam konteks gerakan sosial.  <b>Perbedaan :</b> Perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada jenis gerakan sosial yang terbentuk. Jika penelitian terdahulu fokus pada gerakan sosial dalam ranah sosial dan politik, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan berfokus pada gerakan sosial dalam aspek lingkungan ( <i>environmental social movement</i> ).
9.	Idil Akbar. “Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa yang juga dapat dikatakan sebagai gerakan sosial muncul karena adanya perjuangan terhadap	<b>Persamaan :</b> Persamaan dalam kedua penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif

	<p><i>Dinamika Perubahan Sosial)</i>". Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 107 – 115</p>	<p>nilai-nilai demokrasi. Fenomena atau realitas mengenai gerakan mahasiswa menjadi fenomena tersendiri sebagai upaya untuk melaksanakan demokratisasi di Indonesia, yang dianggap sebagai tolak ukur penting pada keberhasilan bagi perjalanan menuju negara demokratis.</p>	<p>untuk menganalisis permasalahan. Di samping itu, kedua penelitian ini juga berfokus pada munculnya gerakan sosial sebagai gerakan pembawa perubahan.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan dalam kedua kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup subjek dan permasalahan. Jika subjek pada penelitian terdahulu adalah mahasiswa dan munculnya gerakan karena ingin memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah gerakan sosial yang bentuk oleh warga Desa Lakardowo dan dengan latar belakang masalah untuk menghentikan kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.</p>
10.	<p>Wahyudi "Fenomena dan Struktur Gerakan Sosial Petani Studi Kasus Reklamasi/ Penjarahan Atas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dibentuk oleh petani Kalibakar muncul dengan tujuan untuk</p>	<p><b>Persamaan :</b> Kedua penelitian ini sama- sama berfokus pada gerakan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah</p>

	<p><i>Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan</i>”. Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 12 Nomor 1 Januari - Juni 2009</p>	<p>menyelesaikan permasalahan status tanah bekas HGU perkebunan Belanda.</p>	<p>yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan dalam kedua penelitian ini terletak pada tujuan dibentuknya gerakan sosial. Jika gerakan sosial dalam penelitian terdahulu dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tanah, maka gerakan sosial yang dibentuk dalam penelitian yang saat ini dilakukan bertujuan untuk menutup industri pelaku penimbunan limbah yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi.</p>
--	--	--	--

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

## 2.2. Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Gerakan Sosial di Indonesia

Menurut Sujatmiko dalam Triwibowo, suatu konsep seperti halnya konsep gerakan sosial (social movement), perlu dijelaskan secara terperinci sehingga dapat diperoleh batasan dan koridor yang dimaksud dari konsep tersebut, sehingga pembahasan tentang konsep tersebut juga tidak semakin melebar (Triwibowo, 2006).

Anthony Giddens dalam Putra mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah upaya yang dilakukan secara bersama (kolektif) dalam rangka mencapai suatu kepentingan yang telah disepakati bersama, atau dalam definisi lain sebuah gerakan yang bertujuan untuk

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama melalui tindakan bersama (Collective Action) (Putra, 2006).

Carthy dan Zald juga menyatakan bahwa gerakan sosial sebagai seperangkat pendapat dan kepercayaan, di mana mewakili prefensi atau pilihan-pilihan untuk merubah beberapa elemen dari struktur sosial dan distribusi imbalan dari sebuah masyarakat (McCarthy & Zald, 1977).

Sementara itu, Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai tahapan interaksi berkelanjutan antara pemilik kekuasaan dan orang-orang yang berhasil mengklaim untuk berbicara atas nama sebuah konstituen yang kurang mewakili secara formal (Tilly, 1979). Pada tahapan ini, orang-orang ini membuat tuntutan yang mungkin secara publik untuk perubahan distribusi kekuasaan dan kembali kepada tuntutan mereka dengan demonstrasi dukungan publik.

Konsep gerakan sosial menurut Stolley setelah mengutip pendapat oleh Trow, menjelaskan tentang gerakan sosial yang memiliki pengertian gerakan sosial ialah upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan melakukan tindakan yang menentang sebuah status quo, wewenang, atau budaya yang sebenarnya sudah biasa (Stolley, 2005). Masyarakat yang melakukan sebuah gerakan akan membangun perasaan yang dinamakan identitas kolektif yaitu tentang membagi perasaan mengenai penyebab dan saling membantu dalam usaha mempertahankan suatu gerakan. Beberapa gerakan berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya.

Adapun menurut Sujatmiko, ia menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai bentuk aksi kolektif untuk orientasi konflik yang sangat jelas ditujukan untuk



lawan sosial ataupun lawan poliyik tertentu yang dilakukan dalam konteks jaringan lintas lembaga yang dipegang erat oleh aktor yang memiliki solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk ikatan yang terjadi di dalam koalisi atau kampanye bersama. (Sujatmiko, 2006)

Di Indonesia sendiri, muncul berbagai macam gerakan sosial yang dilatarbelakangi oleh alasan yang beragam, tujuan yang beragam, hingga eksistensi gerakan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu contoh gerakan sosial yang ada di Indonesia dan relevan dengan kajian penelitian tentang gerakan sosial lingkungan (environmental social movement) yaitu Gerakan Masyarakat Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme di Kendeng.

Gerakan Masyarakat Kendeng merupakan salah satu gerakan sosial yang berlokasi di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Gerakan sosial ini muncul pada tahun 2012 sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap isu pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, lebih tepatnya pabrik semen PT. Semen Indonesia (dahulu bernama PT. Semen Gresik).

Kasus pembangunan PT. Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng sendiri tidak terlepas dari kasus pembangunan pabrik semen yang ada di Pati pada tahun 2006 silam. Pembangunan pabrik semen di Pati pun juga berujung pada penolakan warga setempat, sehingga menginspirasi masyarakat setempat untuk membangun gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan, hingga pada akhirnya pembangunan pabrik semen di Pati gagal dilakukan.

Dengan demikian, karena kegagalan mendirikan pabrik di Pati, maka PT. Semen Indonesia beralih ke kawasan Pegunungan Kendeng. Pemerintah Kabupaten Rembang

sendiri pada hakikatnya telah memberikan izin lingkungan terkait dengan kegiatan penambangan, yang disahkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah No.660.1/30 Tahun 2016.

Adanya surat izin tersebut, tidak membuat keresahan warga di kawasan pegunungan Kendeng berkurang. Warga tetap menolak keras didirikannya pabrik semen di kawasan tersebut karena berpotensi dapat merusak alam dan memperburuk kualitas lingkungan. Oleh karena itu, maka dibentuklah gerakan sosial masyarakat kendeng berupa gerakan sosial keadilan hukum dan HAM.

Gerakan sosial keadilan hukum dan HAM yang dilakukan oleh masyarakat kawasan pegunungan kendeng ini pada hakikatnya bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat setempat yang merasa bahwa PT. Semen Indonesia mengambil hak atas kelestarian lingkungan, hak atas air, serta merampas lahan masyarakat setempat. Dengan disuarakannya aspirasi tersebut, masyarakat kawasan pegunungan kendeng berharap kepada Pemerintah Kab. Rembang agar hak-hak masyarakat dapat dilindungi (Harnanto et al., 2018).

Adapun gerakan yang kedua adalah Gerakan Ekofeminisme di Watu Putih, Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Tidak jauh berbeda dengan latar belakang munculnya gerakan sosial masyarakat kendeng, gerakan ekofeminisme ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kasus pembangunan tambang di kawasan Watu Putih.

Watu Putih sendiri merupakan salah satu sumber air terbesar yang menjadi suplai utama bagi PDAM Blora dan PDAM Rembang. Jika pembangunan tambang dibiarkan, maka kekhawatiran masyarakat akan gundulnya hutan yang berdampak pada daruratnya air bersih bagi warga menjadi ancaman yang nyata.

Dalam kajian feminisme, perempuan dianggap sebagai korban dan kaum yang tertindas. Akan tetapi, perempuan juga dianggap memiliki peran utama dalam menghidupi kehidupan rumah tangga dan mengurus pekerjaannya dalam hal reproduksi (Vandana & Mies, 2005). Konsep feminisme ini kemudian dipatahkan oleh gerakan ekofeminisme yang ada di Watu Putih Kendeng. Sebanyak 300-an ibu-ibu warga Watu Putih Kendeng membuktikan perannya sebagai agensi perempuan yang bukan hanya diam ketika menjadi korban, tetapi secara politis aktif dalam memberikan perlawanan terhadap kasus perusakan lingkungan yang ada di lingkungannya.

Bagi kaum perempuan ini, Watu Putih adalah sosok “ibu” yang memberikan kesuburannya untuk menghidupi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kaum perempuan yang tergabung di dalam gerakan ekofeminisme merasa bertanggung jawab untuk melindungi “ibu” mereka dari potensi kerusakan akibat berdirinya tambang-tambang di kawasan Watu Putih (Akba, 2017).

Di samping Gerakan Masyarakat Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme di Watu Putih Kendeng, juga banyak ditemukan gerakan sosial lingkungan lain di Indonesia, dengan tujuan utama yang serupa yaitu untuk menjaga ekosistem dan kualitas lingkungan agar tidak tercemar, rusak dan hancur akibat ulah pabrik-pabrik dan industri yang tidak bertanggung jawab dan akibat pembangunan pabrik dan industri yang tidak ramah lingkungan.

### **2.2.2 Bentuk / Tipologi Gerakan Sosial**

Dalam pengelompokan gerakan sosial yang dijelaskan oleh Blumer, Aberle, dan Cameroon, pengelompokan gerakan sosial dibagi berdasarkan beberapa aspek yaitu pada aspek tujuan gerakan serta metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Secara umum,

gerakan sosial terbagi menjadi 2 tipe yakni Gerakan Sosial Umum dan Gerakan Sosial Khusus (*Specific Social Movements*) (Blumer, 1995)(Aberle, 1966)(Cameron, 1966).

#### 1) Gerakan Sosial Umum

Gerakan Sosial Umum (*general social movement*) merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah gerakan perempuan (*Woman's movement*). Gerakan ini bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap status ataupun pandangan terhadap perempuan.

Contoh gerakan perempuan yang terjadi di Indonesia adalah gerakan ekofeminisme yang ada di Watu Putih, Kendeng, Rembang. Gerakan ekofeminisme ini bukan hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan tambang, tetapi juga menjadi bukti bahwa kaum perempuan memiliki peran politis dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menyuarakan aspirasi dan mempertahankan kualitas dan kelestarian lingkungan sekitarnya.

#### 2) Gerakan Sosial Khusus

Gerakan sosial khusus (*specific social movements*) adalah sebuah gerakan yang memiliki fokus atau tujuan yang lebih jelas (spesifik) dibandingkan gerakan sosial umum. Beberapa contoh dari gerakan sosial khusus yaitu gerakan anti aborsi, gerakan anti nuklir, hingga munculnya gerakan anti-rasisme yang belakangan ini digaungkan oleh masyarakat di seluruh dunia, akibat adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap masyarakat minoritas (kulit hitam) di Amerika Serikat.

Dalam konteks gerakan sosial khusus, gerakan anti rasisme bukan hanya bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan ras, suku dan agama. Akan tetapi, gerakan anti rasisme secara khusus juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rasisme dapat menjadi boomerang yang dapat menghancurkan kehidupan sosial masyarakat (Paradies, 2016).

Di samping kedua tipe gerakan yang disebutkan oleh Aberle, Cameroon, dan Blumer, gerakan sosial juga dapat dikategorikan berdasarkan beberapa dimensi. Macionis dalam Oman Sukmana menjelaskan bahwa gerakan sosial dapat dikategorikan berdasarkan 2 dimensi, yaitu dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan.

Atas kedua dimensi yang disebutkan tersebut maka gerakan sosial dapat dibagi kedalam empat tipe yakni : gerakan sosial alternatif, Gerakan sosial pembebasan, Gerakan sosial reformasi, dan gerakan sosial revolusi.

Tabel 2.2  
Tipe-tipe gerakan sosial

<b>Sasaran Perubahan</b>	<b>Tingkat Perubahan</b>	
	<b>Terbatas</b>	<b>Menyeluruh</b>
Khusus Individu	Gerakan Sosial Alternatif	Gerakan Sosial Pembebasan
Semua Orang	Gerakan Sosial Reformasi	Gerakan Sosial Revolusi

Sumber: Macionis dalam Oman Sukmana (Sukmana, 2016)

Adapun penjelasan tentang keempat tipe gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial Alternatif, yaitu suatu gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap *status quo* sangat kecil, karena sasaran dari gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang sifatnya terbatas.
2. Gerakan Sosial Pembebasan, yaitu suatu tipe gerakan sosial yang memiliki fokus selektif, tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal (lebih mengakar) pada individu.
3. Gerakan Sosial Reformasi, yaitu tipe gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. Umumnya terjadi dalam suatu sistem politik.
4. Gerakan Sosial Revolusi, yaitu suatu tipe gerakan sosial yang paling keras dibandingkan tipe gerakan sosial gerakan yang lainnya, berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat.

Sesuai dengan kajian penelitian yang saat ini dilakukan, maka gerakan sosial anti penimbunan limbah dapat dikategorikan dalam bentuk gerakan sosial khusus. Dikatakan demikian, karena tujuan dan sasaran dari gerakan sosial anti penimbunan limbah yang ada di Desa Lakardowo secara spesifik yaitu untuk menolak aktifitas penimbunan limbah yang dilakukan oleh PT. PRIA, bukan hanya secara umum untuk melestarikan lingkungan.

Apabila dianalisis menggunakan tipologi gerakan sosial yang dikemukakan oleh Macionis, maka gerakan sosial anti penimbunan limbah yang ada di Desa Lakardowo juga masuk dalam kategori bentuk gerakan sosial reformasi. Dikatakan demikian, karena lingkup perubahan sosialnya terbatas di Desa Lakardowo, bukan perubahan secara menyeluruh di beberapa wilayah di luar ruang lingkupnya.

### 2.2.3 Problematika Limbah Industri Pabrik

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 24 yang menjelaskan mengenai Penimbunan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat penjelasan bahwa kegiatan penimbunan limbah merupakan kegiatan untuk menempatkan limbah B3 terhadap fasilitas penimbunan dengan tujuan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pada pasal 1 poin ke 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 pada penjelasan mengenai pengelolaan limbah B3 menjelaskan bahwa pengolahan limbah B3 adalah untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun. Kegiatan pengolahan limbah ini bertujuan agar ketika limbah dibuang, maka tidak akan mencemari dan merusak lingkungan.

Pada aspek hukum, limbah B3 tergolong pada sebuah tuntutan formal yang mana memiliki artian yakni seseorang bisa diberikan tatan perdata dan pidana jika tidak mengelola limbah B3 tidak yang sesuai pada peraturan yang telah ditentukan. Oleh karenanya sangat penting bagi semua pemilik pabrik ataupun industri untuk selalu mengetahui tentang tata cara pengelolaan limbah B3 sesuai persyaratan wajib.

#### 1. Penimbunan Limbah Medis

Penimbunan limbah B3 yang dilaksanakan oleh para penghasil limbah yang berupa *fly ash* dan slag atau bisa disebut Bottom ash. Penimbunan limbah bisa dikatakan hanya dapat dikatakan dilaksanakan pada fasilitas penimbunan saniter,



penimbunan terkendali, atau penimbunan akhir yang mempunyai izin Pengelolaan limbah B3.

Lingkungan yang mencakup lokasi ataupun fasilitas untuk penimbunan saniter dan penimbunan terkendali harus sesuai persyaratan yang sudah diatur pada perundang-undangan tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana pada penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

Untuk mendapatkan persetujuan dalam upaya melakukan penimbunan limbah B3 maka harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup dengan melampirkan:

- a. Identitas pemohon;
- b. karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan ditimbun;
- c. Lokasi penimbunan limbah B3; dan
- d. Dokumen yang menjelaskan tentang mekanisme penimbunan Limbah B3.

Apabila permohonan yang disampaikan telah memenuhi syarat, selanjutnya Kepala Instansi Lingkungan Hidup akan menerbitkan surat persetujuan untuk melaksanakan kegiatan penimbunan limbah B3 dengan masa berlaku persetujuan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Adapun persyaratan yang harus diajukan oleh pihak pemohon apabila ingin memperpanjang masa berlaku surat persetujuan, yaitu:

1. Identitas penghasil limbah B3 yang melakukan penimbunan
2. Karakteristik, jumlah dan jenis yang akan ditimbun
3. Lokasi atau area yang akan dijadikan tempat penimbunan

4. Kewajiban pemegang surat persetujuan penimbunan limbah B3
5. Masa berlaku persetujuan penimbunan limbah B3

Dalam melakukan penimbunan di lokasi yang terjadi, sebelumnya limbah B3 harus dilakukan enkapsulasi atau intertisasi. Saat melakukan proses enkapsulasi harus melakukan solidifikasi agar menghindari pelindian pada limbah dan mengurangi resiko bahwa limbah bisa diakses oleh organisme pemulung (*scavengers*).

Melakukan enkapsulasi dilakukan dengan metode memasukan limbah sebanyak 2/3 dari volume wadah dan penambahan material immobilisasi hingga penuh sebelum wadah tertutup dan dikiungkung. Material bisa berupa pasir bitumunus atau semen. Tempat yang dipajai berupa *high density polythylane* (HDPE) atau drum logam.

Dalam enkapsulasi limbah dapat berupa benda tajam, abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) melalui insinerator hingga akhirnya adalah hasil enkapsulasi ditimbun dalam fasilitas penimbunan berikut:

1. Penimbunan saniter (*sanitary landfill*);
2. Penimbunan terkontrol (*controlled landfill*); atau
3. Penimbunan akhir (*landfill*) limbah B3.

Ketika berada dalam kondisi darurat seperti dalam penanggulangan bencana tidak boleh untuk melakukan pengelolaan limbah B3 seperti biasanya, enkapsulasi hanya dapat dilakukan pada limbah farmasi sesuai dengan prosedur yang telah diteliti dan ditetapkan seperti diatas.

Pengertiannya inertisasi adalah proses solidifikasi limbah melalui media semen atau material lainnya sebelum limbah bisa ditimbun di dalam tempat atau fasilitas penimbunan saniter (*sanitary landfill*), fasilitas penimbunan terkontrol (*controlled landfill*), atau fasilitas penimbunan akhir limbah B3.

Inertisasi bisa dilakukan pada limbah abu atau residu hasil pembakaran insinerator. Contoh susunan bahan atau komposisi dalam proses inertisasi (solidifikasi) yakni dengan perpaduan percampuran antara abu atau residu hasil pembakaran insinerator (*fly ash* atau *bottom ash*), pasir dan semen *portland* dengan perbandingan 3:1:2 (tiga banding satu banding dua). Proses inertisasi dilakukan dengan cara:

1. Percampuran limbah dengan pasir dan semen menggunakan sekop dengan perbandingan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu tiga banding satu banding dua (3:1:2) atau bisa juga dengan menggunakan komposisi yang lain sehingga dapat memenuhi persyaratan uji kekuatan tekanan dan uji TCLP.
2. Hasilnya perpaduan percampuran berikutnya dituangkan kedalam cetakan dengan dimensi tertentu yang mana ukuran paling rendah ialah empat puluh centimeter kali empat puluh centimeter kali empat puluh centimeter ( 40cm x 40cm x 40cm ), berikutnya setelah cetakan sudah dilapisi dengan menggunakan plastik yang dapat mengungkung campuran komposisi limbah. Hasil dari proses tersebut harus didiamkan selama 5 hari untuk proses penyempurnaan solidifikasi.
3. Mengenai hasil dari percampuran yang telah dimaksud pada nomor 2 harus memenuhi 2 persyaratan yaitu uji kuat dan uji TCLP.

Apabila proses pengolahan limbah telah selesai, selanjutnya limbah hasil solidifikasi dialihkan ke zonasi yang telah ditetapkan sebagai area penempatan limbah hasil solidifikasi. Penempatan limbah hasil solidifikasi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan inertisasi terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri.

Pada kondisi darurat seperti untuk penanggulangan keadaan bencana dimana tidak dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, inertisasi juga dapat dilakukan terhadap limbah farmasi dengan prosedur sebagaimana tersebut di atas.

Guna mengetahui apakah limbah B3 mencemari dan/atau merusak lingkungan atau tidak, pada Pasal 20 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwasanya bahan baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran untuk menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup.

### 2.3 Kerangka Teori

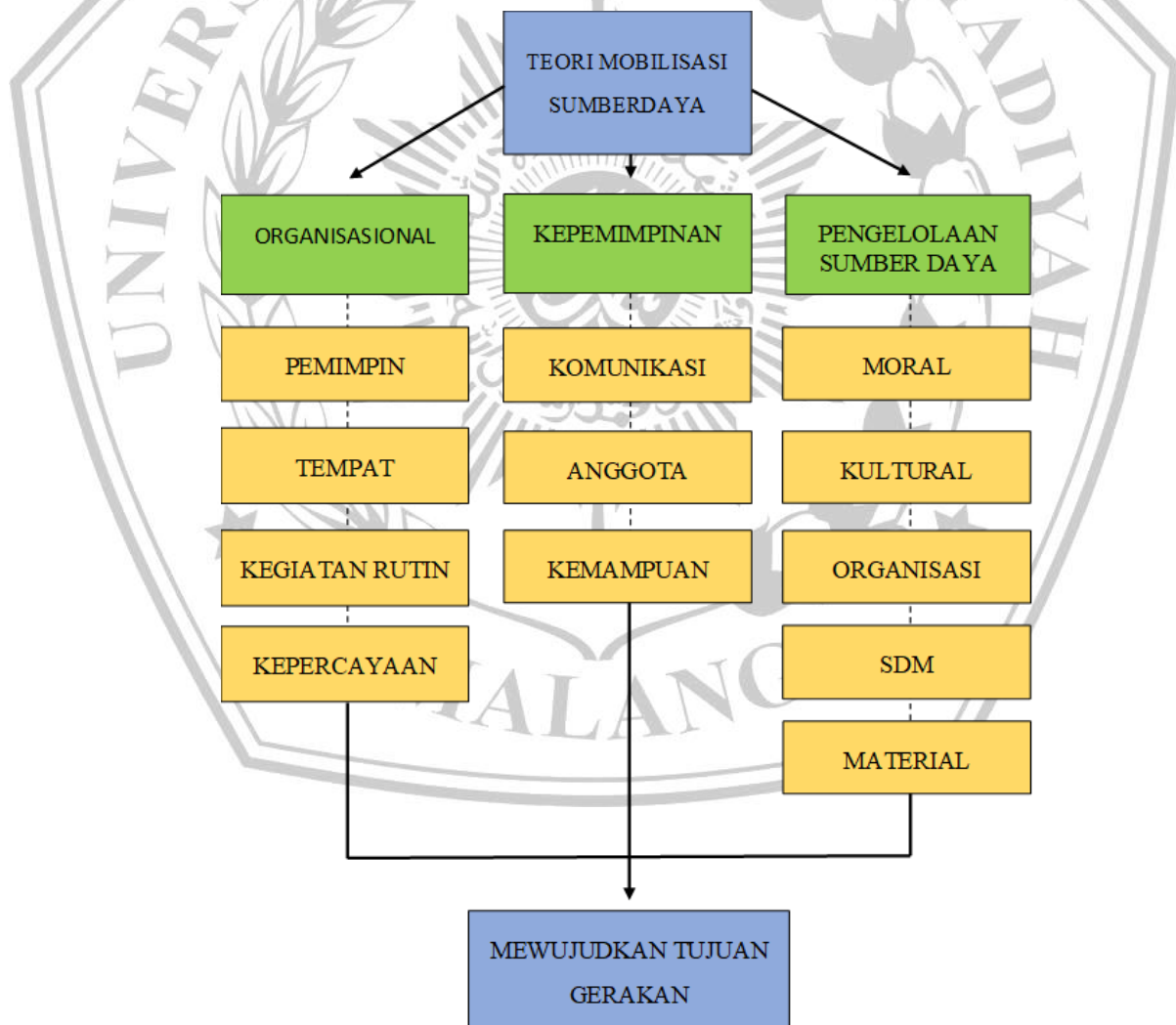
#### Teori Mobilisasi Sumberdaya (Mccarthy)

Teori Mobilisasi Sumberdaya adalah sebuah kerangka teoritik yang sangat dominan untuk menjelaskan gerakan atau sesuatu yang sering disebut tindakan kolektif. Menurut Zucher dan Snow dalam Klandermans. Peneliti menggunakan teori mobilisasi sumberdaya oleh Mccarthy yang ditujukan untuk mengkaji berbagai elemen tertentu, khususnya dari segi sumberdaya yang dimobilisasi dalam penggunaan suatu gerakan. Pendekatan ini berfokus terhadap isolasi serta pemahaman tentang kekuatan yang memiliki kontribusi pada munculnya sebuah gerakan sosial khususnya fisik dan lingkungan yang bisa memberikan pengaruh perkembangan ataupun perilaku gerakan. Konsep tersebut merupakan dasar atas lahirnya teori mobilisasi sumberdaya pada gerakan sosial. (Oman, 2016: 158)

Konsep teori mobilisasi sumberdaya oleh Mccarthy yakni menganggap bahwasanya mobilisasi sumberdaya terdapat organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor utama. Konsep ini untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwasanya organisasi formal membawa gerakan sosial. Faktor penting tersebut dapat lebih mudah dalam melakukan mobilisasi apabila memiliki kelompok komunikasi yang mapan, terdapat bagian anggota yang memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan serta adanya partisipasi tradisonal. Selain itu juga memiliki pemimpin, tempat pertemuan, memiliki kegiatan rutin, terdapat rantai sosial dan berbagai kepercayaan. Menurut Moris dan Staggenborg, para pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial karena mereka dapat menginspirasi, memobilisasi

sumber-sumber, menyusun strategu, dan membingkai tuntutan-tuntutan. (Snow, Soule, & Kriesi, 2004: 171)

Mccarthy juga menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah organisasi yang memiliki kompleksitas atau formal yang sangat identik dengan tujuan dari gerakan sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan tersebut. Selanjutnya menurut Mccarthy mobilisasi sumberdaya harus memiliki 5 Tipe gerakan yaitu, sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi-sosial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya material.



Menurut Mccarthy, untuk mewujudkan tujuan gerakan di dalam kemampuan kepemimpinan diantaranya harus memiliki mekanisme yang meliputi pengumpulan, produksi diri, pengambilan, dan perlindungan. Lebih lanjut tentang lima tipe sumberdaya berikut dengan penjelasannya :

#### 1. Sumberdaya Moral

Meliputi hak kekuasaan, dukungan simpati, dan dukungan solidaritas. Sumberdaya moral cenderung berasal dari luar gerakan sosial atau organisasi sosial dan secara umum diberikan oleh sumber-sumber eksternal.

#### 2. Sumberdaya Kultural

Sumberdaya kultural berisi tentang pengetahuan, membentuk organisasi, sosialisasi membuat pertemuan rutin dan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Didalam kasus anti penimbunan limbah Lakardowo peristiwa tersebut melalui 3 tahapan yakni :

1. Tahapan pertama yakni tahapan kegelisahan (kekhawatiran), yaitu tahap di mana warga merasa terganggu ketenangan dan kesehatannya, karena dampak dari aktifitas penimbunan limbah yang dilakukan oleh PT. PRIA di Desa Lakardowo Mojokerto sudah mulai dirasakan oleh warga setempat, baik melalui air yang terkontaminasi serta kualitas udara yang mulai memburuk akibat asap hasil pembakaran limbah.
2. Tahap keresahan (tidak tenang), yaitu tahap di mana muncul keresahan masyarakat yang disebabkan oleh aktifitas PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) yang dikhawatirkan akan terus memberikan dampak yang lebih buruk bagi warga setempat. Keresahan ini diperburuk dengan tidak adanya respon dari DPRD Kab. Mojokerto setelah adanya



laporan dari warga setempat terkait dengan PT. PRIA. Terdapat kesan bahwa dalam lembaga legislatif yakni DPRD sangat menutup mata terhadap keberadaan PT. PRIA yang sebenarnya sangat tidak menjamin suasana ketentraman dan kehidupan masyarakat di Desa Lakardowo yang membuat masyarakat terus melakukan berbagai unjuk rasa dengan berbagai tuntutan sesuai dengan tujuan gerakan.

3. Tahap kemunculan gerakan, yakni tahapan di mana warga mulai mencari bantuan melalui komunikasi dengan berbagai pihak hingga mendapat pendampingan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni Lembaga *Ecological Observation and Wetland Conservation* (Ecoton). Dengan banyaknya dukungan dari warga setempat, maka terbentuklah gerakan Pendowo Bangkit yang diketuai oleh Nurasim dan gerakan *Green Woman* yang diketuai oleh Ibu Sutamah.

### 3. Sumberdaya Organisasi-sosial

Terdapat 3 bentuk organisasi sosial yakni infrastruktur, jaringan sosial dan organisasi. Dengan dimilikinya 2 gerakan dalam menolak penimbunan limbah yaitu Gerakan Pendowo Bangkit dan Gerakan Green Woman juga memiliki perbedaan meskipun keduanya juga masih dalam dampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ecoton .

### 4. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti tenaga kerja manusia yakni tenaga kerja, pengamanan, keterampilan, dan keahlian.

### 5. Sumberdaya Material

Sumberdaya material atau disebut dengan modal fisik atau finansial yang meliputi sumber-sumber yaitu uang, fasilitas, ruang, dan lain-lain.

Tabel 2.3

Nama Gerakan	Identitas Gerakan
<p>Perkumpulan Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berfokus pada aspek lingkungan</li> <li>2. Konsistensi gerakan selama 4 tahun (2016 sampai sekarang)</li> <li>3. Gerakan tidak memandang status gender dan status sosial</li> <li>4. Gerakan mendapatkan pendampingan dari LSM, aktivis lingkungan dan mahasiswa</li> </ol>
<p><i>Green Woman</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berfokus pada aspek lingkungan</li> <li>2. Konsistensi gerakan selama 2 tahun (2018 sampai sekarang)</li> <li>3. Anggota gerakan terdiri dari kaum perempuan (ibu-ibu dan remaja putri)</li> <li>4. Gerakan mendapatkan pendampingan dari LSM, aktivis lingkungan dan mahasiswa</li> <li>5. Berperan sebagai gerakan pendukung Pendowo Bangkit</li> <li>6. Terbentuk karena keprihatinan kepada balita dan anak-anak yang terkontaminasi air limbah</li> </ol>

Sumber: diolah oleh peneliti